**TRANPARANSI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Edi Maryono**

13.11.1001.3509.133

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan ini untuk (1) mengetahui transparansi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kutai Timur. (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kutai Timur.Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kemudian pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan (1) tanggungjawab pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat tentang aset daerah masih membutuhkan waktu untuk inventaris melalui sensus aset karena sedemikian banyak aset daerah yang dimiliki.Untuk mekanisme pengaduan lebih bersifat internal dengan melibatkan lembaga yang berwenang melakukan memberikan informasi penyalagunaan asset daerah adalah lembaga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) jika ditemukan penyalagunaan aset maka KPK dapat menindaklanjuti temuan tersebut kemudian kemudahan informasi tentang aset masih sulit untuk mengetahui nilai aset tersebut karena masih dalam tahapan sensus aset.(2)Tekanan eksternal berupa tindakan masyarakat belum dilakukan karena masih adanya kepercayaan bahwa pengelolaan aset masih dilakukan tanpa adanya penyelewengan aset, kemudian lingkungan pengelola aset tidak hanya berfokus pada bagian perlengkapan dan pengelolaan aset tetapi seluruh SKPD bertanggungjawab terhadap segala kepemilikan aset milik negara. komitmen manejemen difokuskan pada aset yang belum selesai diinvetarisasi dan pada indikator kapasitas SDM ditemukan bahwa SDM yang dimiliki tidak menjamin pemberian ruang transparansi publik, sejauh ini pegawai masih terbatasi oleh sikap individu yang kaku dalam memberikan data-data yang bersifat kuantitatif.

Kata Kunci : **Transparansi, Pengelolaan, Aset Daerah**

***The Transparency of Bureaucracy in Asset Management Areas at East Kutai Regency***

**Edi Maryono**

13.11.1001.3509.133

**Abstract**

The aim of this study for (1)determine the transparency of asset management area in East Kutai. (2) to determine the factors that affect the transparency of the asset management area in East Kutai. The method used is a qualitative approach with descriptive research type then collecting data obtained through observation, interviews, and documentation. The process of data analysis include data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed (1) the responsibility of the government to provide accurate information about the assets of the region still takes time for inventory through the asset census because of so many local assets owned. For internal complaints mechanisms involving agencies authorized to provide information on the misuse of regional assets is the BPK body if an asset misuse is found, then the KPK may follow up the findings and ease of information on assets is still difficult to know the value of the asset because it is still in (2) External pressure in the form of community action has not been done because there is still a belief that asset management is still done without any diversion of assets, then the asset management environment not only focuses on the equipment and asset management sections but all SKPD is responsible for all ownership of assets country. Management commitments focused on unfinished assets and on human resource capacity indicators found that human resources do not guarantee the provision of public transparency space, so far employees are still limited by rigid individual attitudes in providing quantitative data.

Keywords : *Transparency, Management Of Regional Assets*

**PENDAHULUAN**

Praktek *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting bagi perkembangan praktek good governance. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari 8 prinsip *good governance*. Perwujudan tata pemerintahan yang baik/*good governance* mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik, tata kelola anggaran khususnya dalam penggunaan berbagai sumber daya yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan public (Pradana, 2014).

Selain itu (Kusnadi, 2011), mengemukakan bahwa transparansi juga mensyaratkan pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahandan informasi yang relevan dengan yangkegiatan pelayanan.Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan publik, pelaksana harus terbuka padasetiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan, terutama yang dapat darimasyarakat adalah merupakan kebutuhan utama agar aparatur memahami aspirasi riilmasyarakat. Keterbukaan sangat diperlukan untuk mengurangi peluang timbulnya perilakuaparatur yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan proses politikdan administrasi dalam artian segala yang terkait dengan pengelolaan kepentingan public membutuhkan akses informasi yang dapat dengan mudah diterima masyarakat. Alhasil akan melahirkan tekanan publik yang menghendaki agar birokrasi harus menjunjung tinggi prinsip transparansi guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan demokratis, pemerintah akhirnya merespon dengan adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan legal formal dari prinsip transparansi.

Hal inilah yang menunjukkan pentingnya transparansi yang merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan (Renyowijoyo,2010).Keberadaan konsep transparansi akan meredam terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pemborosan maupun kebocoran anggaran yang sering dilakukan oleh aparatur-aparatur pemerintah.

Pemerintah daerah, sebagai organisasi sektor publik dituntut memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas (Putra, 2014).

Fenomena yang digambarkan tersebut diperkuat dengan penelitian (Ahuluheluw, 2013)menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat dinilai terkesan tertutup terhadap mekanisme kerja pemerintahan dan pengelolaan program/proyek pembangunan. Masyarakat menjadi lebih apatis atau diam saja terhadap program-program pembangunan yang selama ini menjadi agenda kerja utama pemerintah Distrik Sorong Timur. Hal ini disebabkan oleh Kurangnya Transparansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pandangan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji kelemahan pengelolaan asset daerah dari kacamata transparansi khususnya di Kabupaten Kutai Timur.

Pada tahun anggaran 2014, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendapat predikat atau opini wajar dengan pengecualian. belum bergeraknya predikat WDP ke WTP (wajar tanpa pengecualian) hingga tahun ini disebabkan beberapa factor salah satunya adalah masalah aset peninggalan dari Pemerintah Kabupaten Kutai.

Aset peninggalan ini yang mengakibatkan sampai sekarang Pemerintah Kutai Timur hanya bisa meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI penyebab sulitnya meraih predikat WTP adalah asset tanah. Selama ini pengelolaan aset daerah di beberapa daerah masih menjadi permasalahan yang mengganjal bagi daerah tersebut untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK.Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan asset daerah adalah posisi akhir  dan nilai asset.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk mengakaji pengelolaan asset daerah di Kabupaten Kutai Timur dari sudut pandang prinsip transparansi sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui untuk mengetahui transparansi pengelolaan aset daerah dan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kutai Timur.

**KERANGKA KONSEP DAN TEORI**

**Good Governance**

Konsep *Good Governance*dianggapsebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal dan political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan (Nawawi, 2013).

Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminology governancemembantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. Winarnodalam (Syahdianto, 2013), mengungkapkan bahwa *Governance* mengakui didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda.

**Konsep Transparansi**

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri, menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Transparancy International, undang-undangFredom of Information(FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. (Krina, 2003).

Transparansi adalah adanyakebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud denganinformasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahyang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akanmenghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public (Rahman, 2000).

**Karakteristik Transparansi**

Menurut Mardiasmo (2002) karakteristik Transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut : (1) informativeness (informatif) yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. (2) Openess (keterbukaan) yaitu keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang. (3) Disclosure (pengungkapan) yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial.

**Tujuan dan manfaat Transparans**

Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara insitusi dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Muhammad 2007).Selanjutnya Adrianto, (2007: 21) berpendapat bahwa ada beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut: (1) mencegah korupsi, dimana lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. (2) meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga. (3) meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. (5) menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. (6) menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Styles dan Tennyson (2007) mengatakan bahwa suatau cara yang paling baik dan cost effective bagi pihak pemerintahan untuk menyebarkan informasinya pada masa kini adalah melalui media internet yaitu dengan mempublikasikan informasi keuangannya melalui website resmi. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangannya pada website resmi sebagaimana yang dikemukakan dalam (Lubis, 2015)yaitu (1) media internet menawarkan biaya yang rendah bagi pengguna dan penyedia informasi. (2) internet dapat diakses dimana saja dan kapan saja sehingga cenderung tidak memiliki batasan bagi pengguna dan penyeddia informasi. (3) Informasi yang diungkapkan dapat disajikan dalam berbagai bentuk sehingga dapat memudahkan pengguna.

**Prinsip transparansi**

Prinsip transparansi Didjaja (2003), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut (1) keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya. (2) keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahuioleh masyarakat. (3) keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancana) (4) keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll)(5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

**Dimensi dan Indikator Transparansi**

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balanceantara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009).

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis Menurut (Maani, 2009) yaitu (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (availability of information),(2) kejelasan peran dan tanggung jawab diantara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik.

Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang Transparansi dan Akuntabilitas terrlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, di mana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :(1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.(2) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.(3) kemudahan akses informasi.(4) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Terdapat sejumlah factor yang mempengaruhi transparansi hal ini dikemukakan Meyer dan Rowan (1977) mengidentifikasi bahwa organisasi akan mendapatkan legitimasi, stabilitas, dan sumber daya apabila sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kemudian secara rinci factor-faktor yang mempengaruhi transparansi dikemukakan dalam Masruroh, (2015) yaitu tekanan eksternal,ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dankapasitas sumber daya manusia.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudianteknik analisis data berdasarkan yang diungkapkan (Sugiyono, 2011) yaitu *data reduction, data display,*dan *conclusion drawing/verification.*

**HASIL PENELITIAN**

**Transparansi Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur**

Untuk melihat aspek transparansi aset daerah di Kabupaten Kutai Timur mengacu pada indikator transparansi (Krina, 2003) yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, kemudahan akses informasi, dan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

**Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa belum ada informasi yang disajikan kepada masyarakat secara terbuka, data aset yang dimiliki digunakan untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang tujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ketahui bahwa informasi yang disampaikan adalah tentang perkembangan sensus aset tidak menjelaskan secara rinci tentang tanggungjawab pengelolaan aset dan nilai aset itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh gambaran bahwa tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan aset daerah yakni dalam pengadministrasian penyerahan barang milikdaerah dan pengelolaan dokumen aset pemerintah kabupaten.

Kemudian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat tentang aset daerah masih membutuhkan waktu untuk inventaris melalui sensus aset karena sedemikian banyak aset daerah yang dimiliki.

**Menyusun suatu mekanisme pengaduan**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang memberikan informasipenyalagunaan asset daerah adalah lembaga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) jika ditemukan penyalagunaan aset maka KPK dapat menindaklanjuti temuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa untuk menjamin tertibnya pengunaan aset daerah maka pengunaan aset daerah harus dilaporkan kepada pengelola barang milik daerah. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan aset daerah, perlengkapan dan peralatan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak.

**Kemudahan akses informasi**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa informasi terkait aset daerah tidak dipublikasikan secara umum hanya sebagaian besar jenis aset yang diketahui oleh masyarakat sementara informasi terkait nilai aset masih belum diketahui secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat mengharapkan pengelolaan aset daerah mampu diinventarisasi dengan melakukan validasi data sensus sebagai tahapan agar nilai aset daerah dapat ditentukan. Hal ini berarti bahwa informasi tentang nilai aset daerah belum dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan karena hasil validasi data sensus belum dirampungkan.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Kutai Timur**

Adapunfaktor-faktor yang mempengaruhi transparansi yang mengacu pada sejumlah indicator yaitu tekanan eksternal,ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen,dan kapasitas Sumber daya manusia. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai tiap-tiap indikator faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan aset daerah Kabupaten Kutai Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

**Faktor internal**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa untuk tekanan politik pada pengelolaan aset daerah tidak terjadi justru tekanan eksternal yang mempengaruhi transparansi pengelolaan aset daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu pemeriksaan BPK yang mngaudit setiap aset pemerintah yang ada di Kabupaten Kutai Timur.Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tekanan eksternal berupa tindakan masyarakat belum dilakukan karena masih adanya kepercayaan bahwa pengelolaan aset masih dilakukan tanpa adanya penyelewengan aset oleh karena itu diharapkan transparansi dalam pengelolaan aset akan dapat menuntun pemerintah kabupaten kutai Timur mencapai tujuan yakni mendapat hasil pemeriksaan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Ketidakpastian Lingkungan**

Dari hasil wawancara dapat diperoleh gambaran bahwa lingkungan Sekretariat Daerah merupakan terdiri dari sejumlah dinas yang juga bertanggungjawab terhadap segala aset milik negara. Dukungan individu dan unit dinas di dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Timur merupakan lingkungan internal yang seharusnya dapat mendukung transparansi pengelolaan aset daerah sehingga tidak terjadi penyelagunaan aset daerah.

**Komitmen Manajemen**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa komitmen manejemen yang dilakukan terkait dnegan inventarisasi aset-aset daerah seperti pada pertanahan yang dalam laporan BPK masih terdapat aset yang belum terselesaikan inventarisasinya hal inilah yang menjadi dasar komitmen manajemen perlu dilakukan agar inventarisasi aset daerah dapat dilakukan dengan efektif.

**Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Dari data yang disajikan dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa 43 Pegawai dengan berbagai latar belakang pendidikan yang didominasi dengan latar belakang pendidikan S1 meskipun tidak seluruhnya. Berdasarkan data dari Sekretariat daerah kabupaten Kutai Timur terdapat 43 orang PNS pada bagian perlengkapan dan aset daerah, 51 TK2D, Magang 4 Orang dengan jumlah total 98 Orang. Pimpinan Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset daerah memiliki kepangkatan Pembina Tk. I yang berarti tertinggi dari pegawai lainnya.

Untuk mengetahui relavansi Kapasitas SDM sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi transparansi maka perlu penelusuran wawancara dengan informan masyarakat terkait dengan kapasitas pegawai yang transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kapasitas SDM yang dimiliki tidak menjamin pemberian ruang transparansi publik sejauh ini pegawai masih terbatasi oleh sikap individu yang kaku dalam memberikan data-data kuantitatif terkait nilai-nilai aset daerah.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Tanggungjawab pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat tentang aset daerah masih membutuhkan waktu untuk inventaris melalui sensus aset karena sedemikian banyak aset daerah yang dimiliki.Untuk mekanisme pengaduan lebih bersifat internal dengan melibatkan lembaga yang berwenang jika ditemukan penyalagunaan aset maka KPK dapat menindaklanjuti temuan tersebut kemudian kemudahan informasi tentang aset masih sulit untuk mengetahui nilai aset tersebut karena masih dalam tahapan sensus aset.Tekanan eksternal berupa tindakan masyarakat belum dilakukan karena masih adanya kepercayaan bahwa pengelolaan aset masih dilakukan tanpa adanya penyelewengan aset, kemudian lingkungan pengelola aset tidak hanya berfokus pada bagian perlengkapan dan pengelolaan aset tetapi seluruh SKPD bertanggungjawab terhadap segala kepemilikan aset milik negara. komitmen manejemen difokuskan pada aset yang belum selesai diinvetarisasi dan pada indikator kapasitas SDM ditemukan bahwa SDM yang dimiliki tidak menjamin pemberian ruang transparansi publik, sejauh ini pegawai masih terbatasi oleh sikap individu yang kaku dalam memberikan data-data yang bersifat kuantitatif (nilai atau angka).

**Saran**

Koordinasi dan kerjasama dalam sensus atau inventarisasi aset perlu diperkuat untuk mempercepat proses administrasi aset yang efektif dan efesien. Transparasi dapat dirasakan oleh masyarakat jika data atau nilai aset dapat dipublikasikan di website dan diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui lebih mendetail tentang aset daerah yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahuluheluw, Stevan Selfanus. 2013 *Pentingnya Transparansi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Distrik Sorong Timur Kota Sorong*. Diakses 12 Oktober 2016.<http://ejournal.unsrat.ac.id>.

Didjaja, Mustopa.2003.*Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Krina, Loina Lalolo, 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &Partisipasi.* Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kusnadi, Dedek. 2011. *Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik.* Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan, Volume 3, Nomor 1.

Lubis, Annisa Thahirah. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara

Maani, Dt. Karjuni. 2009. *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayananan Publik*. Jurnal Demokrasi Volume 8, No 1 .

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi

Masruroh, Aviva Fitri. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 7

Meyer, J. dan B. Rowan. 1977. *Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony*. The American Journal of Sociology.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nawawi, Zaidan. 2013 *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Raja Grafindo

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*

Pradana, I Putu Yoga Bumi. 2014. *Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang.* Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18 No 2.

Putra G Hendra. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat).*Padang: Universitas Negeri Padang

Rahman, Meutiah Ganie. 2000. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapanya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik*). Jakarta: Penerbit Komnas HAM.

Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan.* Bandung: PT Refika Aditama.

Styles, Alan K; Mack Tennyson. 2007. *The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on the Internet*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. Vol 19.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuntitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syahdianto, Dody. 2013. *Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Pada Kantor Camat Medan Helvetia).* Medan: Universitas Sumatera Utara.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik.*